

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2. PROGRAM

:

CF - Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
3. SASARAN PROGRAM

:

01 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU
02 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
03 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya
04 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
05 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
06 - Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
4. KEGIATAN

:

3863 - Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

03 - Biro Persidangan I

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersusunnya rumusan rancangan UU		33.473.849,0
01.01	Nilai tertimbang pelaksanaan uji sah dan finalisasi RUU	6	
02	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR		12.229.171,0
02.01	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar	0,2	
03	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU Lainnya		0,0
03.01	Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar	0,1	
04	Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang		3.028.086,0
04.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	0,1	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
05	Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah		25.029.754,0
05.01	Nilai tertimbang masukan sesuai standar	1,1	
06	Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI		9.910.472,0
07	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan		5.579.410,0
07.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	0,1	
08	Tersedianya masukan atas perubahan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan kebijakan baru		1.227.545,0
08.01	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar	0,1	
09	Tersedianya masukan untuk sinkronisasi legislasi pusat dan daerah		1.317.408,0
09.01	Nilai tertimbang masukan terhadap sinkronisasi legislasi pusat dan daerah	0,1	
10	Tersedianya masukan terhadap RUU Inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU		0,0
10.01	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar	0.2	
11	Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya		1.726.647,0
11.01	Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya	0,1	
Total			93.522.342,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Tersusunnya rumusan rancangan UU										33.473.849,0
01.AAA	Undang-Undang										33.473.849,0
01.AAA.001	RUU USUL TUGAS KOMITE I										11.864.822,0
	051 - PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU										689.561,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								689.561,0
	052 - KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI										913.630,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								913.630,0
	053 - STUDI BANDING RUU										9.082.425,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								9.082.425,0
	054 - UJI SAHIIH RUU										1.025.708,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.025.708,0
	055 - FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD										153.498,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								153.498,0
01.AAA.004	RUU USUL TUGAS KOMITE III DPD RI										10.091.628,0
	051 - PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU										717.410,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								717.410,0
	052 - KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI										1.418.526,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.418.526,0
	053 - STUDI BANDING RUU										6.951.690,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								6.951.690,0
	054 - UJI SAHIIH RUU										717.902,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								717.902,0
	055 - FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD										286.100,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								286.100,0
01.AAA.007	USUL PROLEGNAS DPD RI										1.642.145,0
	051 - PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PROLEGNAS USUL DPD										365.019,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								365.019,0
	052 - KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI										939.076,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								939.076,0
	053 - FINALISASI PROLEGNAS USUL DPD										338.050,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								338.050,0
01.AAA.008	RUU USUL TUGAS PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI										9.332.054,0
	051 - PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU										484.022,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								484.022,0
	052 - KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI RUU										751.238,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								751.238,0
	053 - STUDI BANDING RUU										5.066.548,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								5.066.548,0
	054 - UJI SAHIIH RUU										678.446,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								678.446,0
	055 - FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD										311.800,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								311.800,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	056 - PENETAPAN RUU USUL DARI DPD RI										2.040.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								2.040.000,0
01.AAA.009	KONSEP RUU										543.200,0
	051 - HARMONISASI PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU										543.200,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								543.200,0
02	<i>Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR</i>										12.229.171,0
02.AAA	Undang-Undang										11.665.552,0
02.AAA.002	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU (KOMITE I)										11.385.992,0
	051 - PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD										245.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								245.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAERAH OTONOMI BARU										3.713.664,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.713.664,0
	053 - PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN DAERAH OTONOMI BARU										3.713.664,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.713.664,0
	054 - PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PELAKSANAAN UU TENTANG DESA										3.713.664,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.713.664,0
02.AAA.005	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU										279.560,0
	051 - FINALISASI PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD										279.560,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								279.560,0
02.AEA	Koordinasi										563.619,0
02.AEA.002	RUU TERTENTU HASIL PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH)										563.619,0
	051 - PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA KOMITE I										233.931,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								233.931,0
	052 - PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA KOMITE III										285.680,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								285.680,0
	053 - PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA PPUU										44.008,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								44.008,0
04	<i>Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang</i>										3.028.086,0
04.AEA	Koordinasi										3.028.086,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.AEA.001	PERSIDANGAN DAN MATERI DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I										1.880.000,0
	051 - PELAKSANAAN FUNGSI DUKUNGAN PENYUSUNAN MATERI DAN PERSIDANGAN DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I										1.880.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.880.000,0
04.AEA.003	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE I										639.816,0
	051 - KUNJUNGAN KERJA										639.816,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								639.816,0
04.AEA.004	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE III										508.270,0
	051 - KUNJUNGAN KERJA										508.270,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								508.270,0
05	<i>Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah</i>										25.029.754,0
05.AAA	Undang-Undang										25.029.754,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
05.AAA.003	HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU (KOMITE I)										15.449.052,0
	051 - INVENTARISASI MATERI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU										5.052.340,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								5.052.340,0
	052 - PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU										2.813.934,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								2.813.934,0
	053 - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI DAERAH PERSIAPAN UNTUK MENJADI DAERAH OTONOMI BARU										3.713.664,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.713.664,0
	054 - PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD TENTANG KEBIJAKAN DAU TENTANG DANA DESA										3.713.664,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.713.664,0
	055 - PENYUSUNAN BUKU LAPORAN KINERJA KOMITE I										155.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								155.450,0
05.AAA.006	HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU										9.580.702,0
	051 - KUNJUNGAN KERJA INVENTARISASI MATERI										957.669,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								957.669,0
	052 - PELAKSANAAN PENGAWASAN UU NO. 8 TAHUN 2019, TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH										5.637.476,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								5.637.476,0
	053 - PELAKSANAAN PENGAWASAN UU NO.18 TAHUN 2017, TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA										1.701.319,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.701.319,0
	054 - PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU										493.300,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								493.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	055 - FINALISASI PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU										774.888,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								774.888,0
	056 - PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOMITE III										16.050,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								16.050,0
06	<i>Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI</i>										9.910.472,0
06.AAH	Peraturan lainnya										409.050,0
06.AAH.001	Peraturan lainnya										409.050,0
	051 - PERENCANAAN										10.950,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								10.950,0
	052 - PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN										398.100,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								398.100,0
06.AEC	Kerja sama										9.501.422,0
06.AEC.001	KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN LEMBAGA INTERNASIONAL										9.501.422,0
	051 - KERJASAMA BILATERAL PARLEMEN										4.768.947,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								4.768.947,0
	052 - SINERGITAS KERJA SAMA BKSP DPD RI DENGAN PERWAKILAN NEGARA SAHABAT DAN STAKE HOLDERS TERKAIT										567.825,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								567.825,0
	053 - FASILITASI POTENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGUATAN KERJA SAMA LUAR NEGERI										385.322,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								385.322,0
	054 - PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN MATERI DPD PADA KEGIATAN DIPLOMASI INTERNASIONAL BERSIFAT KEDAERAHAN										3.779.328,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.779.328,0
07	<i>Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan</i>										5.579.410,0
07.ABC	Kebijakan Bidang Politik										5.579.410,0
07.ABC.001	PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN DAERAH										5.579.410,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - PENYUSUNAN PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH										730.793,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								730.793,0
	052 - PEMANTAUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH										1.622.315,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.622.315,0
	053 - EVALUASI HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA DAN PERDA										300.313,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								300.313,0
	054 - PERUMUSAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH										214.660,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								214.660,0
	055 - UJI PUBLIK										1.799.279,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.799.279,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	056 - PENYUSUNAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH										705.750,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								705.750,0
	057 - PENYUSUNAN MATERI KINERJA BULD										206.300,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								206.300,0
08	<i>Tersedianya masukan atas perubahan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan kebijakan baru</i>										1.227.545,0
08.ABC	Kebijakan Bidang Politik										1.227.545,0
08.ABC.002	PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN ATAS PERMINTAAN DAERAH TENTANG PERMASALAHAN HUKUM DI DAERAH										1.227.545,0
	051 - KONSULTASI STAKEHOLDERS DAERAH										83.171,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								83.171,0
	052 - TEMU KONSULTASI LEGISLASI PUSAT-DAERAH										1.006.324,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.006.324,0
	053 - PERUMUSAN										129.050,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								129.050,0
	054 - FINALISASI										9.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								9.000,0
09	<i>Tersedianya masukan untuk sinkronisasi legislasi pusat dan daerah</i>										1.317.408,0
09.ABC	Kebijakan Bidang Politik										692.526,0
09.ABC.003	MONITORING TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA										692.526,0
	051 - PEMUTAKHIRAN KONSEPSI										116.371,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								116.371,0
	052 - TINJAUAN LAPANGAN										362.705,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								362.705,0
	053 - PERUMUSAN MATERI										195.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								195.450,0
	054 - FINALISASI										18.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								18.000,0
09.AEA	Koordinasi										624.882,0
09.AEA.005	DISEMINASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA / PERDA										624.882,0
	051 - KOMPILASI MATERI										126.650,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								126.650,0
	052 - DIALOG DAERAH										355.382,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								355.382,0
	053 - Diseminasi Rekomendasi DPD RI										133.850,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								133.850,0
	054 - FINALISASI										9.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								9.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
11	<i>Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya</i>										1.726.647,0
11.AAA	Undang-Undang										1.726.647,0
11.AAA.010	UU HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN DPD RI										1.726.647,0
	051 - PERENCANAAN										179.440,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								179.440,0
	052 - PELAKSANAAN										1.249.132,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.249.132,0
	053 - TINDAK LANJUT										292.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								292.000,0
	054 - PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PPUU										6.075,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								6.075,0
Total											93.522.342,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersusunnya rumusan rancangan UU				33.473.849,0				0,0	0,0	0,0
01.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		33.473.849,0				0,0	0,0	0,0
01.AAA.001	RUU USUL TUGAS KOMITE I	1	RUU		11.864.822,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AAA.001.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU	1,0	RUU	689.561,0	689.561,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.001.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI	1,0	RUU	913.630,0	913.630,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.001.053	STUDI BANDING RUU	1,0	RUU	9.082.425,0	9.082.425,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.001.054	UJI SAHIF RUU	1,0	RUU	1.025.708,0	1.025.708,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.001.055	FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD	1,0	RUU	153.498,0	153.498,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.004	RUU USUL TUGAS KOMITE III DPD RI	1	RUU		10.091.628,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AAA.004.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU	1,0	RUU	717.410,0	717.410,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.004.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI	1,0	RUU	1.418.526,0	1.418.526,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.004.053	STUDI BANDING RUU	1,0	RUU	6.951.690,0	6.951.690,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.004.054	UJI SAHIF RUU	1,0	RUU	717.902,0	717.902,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.004.055	FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD	1,0	RUU	286.100,0	286.100,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.007	USUL PROLEGNAS DPD RI	1	RUU		1.642.145,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AAA.007.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PROLEGNAS USUL DPD	1,0	UUMATERI	365.019,0	365.019,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.007.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI	1,0	UUMATERI	939.076,0	939.076,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.007.053	FINALISASI PROLEGNAS USUL DPD	1,0	UUMATERI	338.050,0	338.050,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.008	RUU USUL TUGAS PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI	1	RUU		9.332.054,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AAA.008.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU	1,0	RUU	484.022,0	484.022,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.008.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI RUU	1,0	RUU	751.238,0	751.238,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AAA.008.053	STUDI BANDING RUU	1,0	RUU	5.066.548,0	5.066.548,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.008.054	UJI SAHIF RUU	1,0	RUU	678.446,0	678.446,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.008.055	FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD	1,0	RUU	311.800,0	311.800,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.008.056	PENETAPAN RUU USUL DARI DPD RI	1,0	RUU	2.040.000,0	2.040.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AAA.009	KONSEP RUU	4	RUU		543.200,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.AAA.009.051	HARMONISASI PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU	4,0	RUU	135.800,0	543.200,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
02	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR				12.229.171,0				0,0	0,0	0,0
02.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		11.665.552,0				0,0	0,0	0,0
02.AAA.002	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU (KOMITE I)	1	RUU		11.385.992,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.AAA.002.051	PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD	1,0	RUU	245.000,0	245.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AAA.002.052	PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAERAH OTONOMI BARU	1,0	RUU	3.713.664,0	3.713.664,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AAA.002.053	PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN DAERAH OTONOMI BARU	1,0	RUU	3.713.664,0	3.713.664,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AAA.002.054	PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PELAKSANAAN UU TENTANG DESA	1,0	RUU	3.713.664,0	3.713.664,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AAA.005	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU	1	RUU		279.560,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.AAA.005.051	FINALISASI PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD	1,0	RUU	279.560,0	279.560,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		563.619,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.002	RUU TERTENTU HASIL PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH)	3	kegiatan		563.619,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.051	PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA KOMITE I	3,0	Kegiatan	77.977,0	233.931,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.052	PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA KOMITE III	3,0	Kegiatan	95.226,7	285.680,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.002.053	PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA PPUU	3,0	Kegiatan	14.669,3	44.008,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
04	Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang				3.028.086,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		3.028.086,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA.001	PERSIDANGAN DAN MATERI DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I	2	kegiatan		1.880.000,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
04.AEA.001.051	PELAKSANAAN FUNGSI DUKUNGAN PENYUSUNAN MATERI DAN PERSIDANGAN DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I	2,0	Kegiatan	940.000,0	1.880.000,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA.003	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE I	8	kegiatan		639.816,0	8	8	8	0,0	0,0	0,0
04.AEA.003.051	KUNJUNGAN KERJA	8,0	Kegiatan	79.977,0	639.816,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE III	8	kegiatan		508.270,0	8	8	8	0,0	0,0	0,0
04.AEA.004.051	KUNJUNGAN KERJA	8,0	Kegiatan	63.533,8	508.270,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
05	Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah				25.029.754,0				0,0	0,0	0,0
05.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		25.029.754,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
05.AAA.003	HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU (KOMITE I)	6	UU		15.449.052,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
05.AAA.003.051	INVENTARISASI MATERI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU	4,0	UU	1.263.085,0	5.052.340,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.003.052	PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	4,0	UU	703.483,5	2.813.934,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.003.053	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI DAERAH PERSIAPAN UNTUK MENJADI DAERAH OTONOMI BARU	4,0	UU	928.416,0	3.713.664,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.003.054	PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD TENTANG KEBIJAKAN DAU TENTANG DANA DESA	4,0	UU	928.416,0	3.713.664,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.003.055	PENYUSUNAN BUKU LAPORAN KINERJA KOMITE I	4,0	BUKU	38.862,5	155.450,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.006	HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	5	UU		9.580.702,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
05.AAA.006.051	KUNJUNGAN KERJA INVENTARISASI MATERI	4,0	UU	239.417,3	957.669,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.006.052	PELAKSANAAN PENGAWASAN UU NO. 8 TAHUN 2019, TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH	4,0	UU	1.409.369,0	5.637.476,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.006.053	PELAKSANAAN PENGAWASAN UU NO.18 TAHUN 2017, TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	4,0	UU	425.329,8	1.701.319,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.006.054	PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	4,0	UU	123.325,0	493.300,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.006.055	FINALISASI PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	4,0	UU	193.722,0	774.888,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
05.AAA.006.056	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOMITE III	4,0	UU	4.012,5	16.050,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
06	Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI				9.910.472,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
06.AAH	Peraturan lainnya		peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan		409.050,0				0,0	0,0	0,0
06.AAH.001	Peraturan lainnya	1	peraturan		409.050,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
06.AAH.001.051	PERENCANAAN	2,0	Peraturan	5.475,0	10.950,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
06.AAH.001.052	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN	2,0	Peraturan	199.050,0	398.100,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
06.AEC	Kerja sama		Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan		9.501.422,0				0,0	0,0	0,0
06.AEC.001	KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	3	Kesepakatan		9.501.422,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
06.AEC.001.051	KERJASAMA BILATERAL PARLEMEN	2,0	Kesepakatan	2.384.473,5	4.768.947,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
06.AEC.001.052	SINERGITAS KERJA SAMA BKSP DPD RI DENGAN PERWAKILAN NEGARA SAHABAT DAN STAKE HOLDERS TERKAIT	2,0	Kesepakatan	283.912,5	567.825,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
06.AEC.001.053	FASILITASI POTENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGUATAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	2,0	Kesepakatan	192.661,0	385.322,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
06.AEC.001.054	PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN MATERI DPD PADA KEGIATAN DIPLOMASI INTERNASIONAL BERSIFAT KEDAERAHAN	2,0	Kesepakatan	1.889.664,0	3.779.328,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
07	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan				5.579.410,0				0,0	0,0	0,0
07.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		5.579.410,0				0,0	0,0	0,0
07.ABC.001	PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN DAERAH	2	Rekomendasi Kebijakan		5.579.410,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
07.ABC.001.051	PENYUSUNAN PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	2,0	Materi	365.396,5	730.793,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
07.ABC.001.052	PEMANTAUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH	2,0	Materi	811.157,5	1.622.315,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
07.ABC.001.053	EVALUASI HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA DAN PERDA	2,0	Materi	150.156,5	300.313,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
07.ABC.001.054	PERUMUSAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH	2,0	Materi	107.330,0	214.660,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
07.ABC.001.055	UJI PUBLIK	2,0	Materi	899.639,5	1.799.279,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
07.ABC.001.056	PENYUSUNAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH	2,0	Materi	352.875,0	705.750,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
07.ABC.001.057	PENYUSUNAN MATERI KINERJA BULD	2,0	Materi	103.150,0	206.300,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
08	Tersedianya masukan atas perubahan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan kebijakan baru				1.227.545,0				0,0	0,0	0,0
08.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		1.227.545,0				0,0	0,0	0,0
08.ABC.002	PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN ATAS PERMINTAAN DAERAH TENTANG PERMASALAHAN HUKUM DI DAERAH	1	Rekomendasi Kebijakan		1.227.545,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
08.ABC.002.051	KONSULTASI STAKEHOLDERS DAERAH	1,0	Rekomnedasi Kebijakan	83.171,0	83.171,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
08.ABC.002.052	TEMU KONSULTASI LEGISLASI PUSAT-DAERAH	1,0	Rekomendasi Kebijakan	1.006.324,0	1.006.324,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
08.ABC.002.053	PERUMUSAN	1,0	Rekomendasi Kebijakan	129.050,0	129.050,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
08.ABC.002.054	FINALISASI	1,0	Rekomendasi Kebijakan	9.000,0	9.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09	Tersedianya masukan untuk sinkronisasi legislasi pusat dan daerah				1.317.408,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
09.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		692.526,0				0,0	0,0	0,0
09.ABC.003	MONITORING TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA	2	Rekomendasi Kebijakan		692.526,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
09.ABC.003.051	PEMUTAKHIRAN KONSEPSI	2,0	Rekomendasi Kebijakan	58.185,5	116.371,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09.ABC.003.052	TINJAUAN LAPANGAN	2,0	Rekomendasi Kebijakan	181.352,5	362.705,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09.ABC.003.053	PERUMUSAN MATERI	2,0	Rekomendais Kebijakan	97.725,0	195.450,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09.ABC.003.054	FINALISASI	2,0	Rekomendasi Kebijakan	9.000,0	18.000,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09.AEA	Koordinasi		kegiatan		624.882,0				0,0	0,0	0,0
09.AEA.005	DISEMINASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA / PERDA	1	kegiatan		624.882,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
09.AEA.005.051	KOMPILASI MATERI	1,0	Kegiatan	126.650,0	126.650,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09.AEA.005.052	DIALOG DAERAH	1,0	Kegiatan	355.382,0	355.382,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09.AEA.005.053	Diseminasi Rekomendasi DPD RI	1,0	Kegiatan	133.850,0	133.850,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
09.AEA.005.054	FINALISASI	1,0	Kegiatan	9.000,0	9.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
11	Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya				1.726.647,0				0,0	0,0	0,0
11.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		1.726.647,0				0,0	0,0	0,0
11.AAA.010	UU HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN DPD RI	1	UU		1.726.647,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
11.AAA.010.051	PERENCANAAN	1,0	Materi	179.440,0	179.440,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
11.AAA.010.052	PELAKSANAAN	1,0	Materi	1.249.132,0	1.249.132,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
11.AAA.010.053	TINDAK LANJUT	1,0	Materi	292.000,0	292.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
11.AAA.010.054	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PPUU	1,0	Buku	6.075,0	6.075,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					93.522.342,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tersusunnya rumusan rancangan UU		33.473.849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.473.849,0
01.AAA	Undang-Undang		33.473.849,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.473.849,0
01.AAA.001	RUU USUL TUGAS KOMITE I		11.864.822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.864.822,0
01.AAA.001.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU	Utama	689.561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689.561,0
01.AAA.001.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI	Utama	913.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	913.630,0
01.AAA.001.053	STUDI BANDING RUU	Utama	9.082.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.082.425,0
01.AAA.001.054	UJI SAHIIH RUU	Utama	1.025.708,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.025.708,0
01.AAA.001.055	FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD	Utama	153.498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153.498,0
01.AAA.004	RUU USUL TUGAS KOMITE III DPD RI		10.091.628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.091.628,0
01.AAA.004.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU	Utama	717.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717.410,0
01.AAA.004.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI	Utama	1.418.526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418.526,0
01.AAA.004.053	STUDI BANDING RUU	Utama	6.951.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.951.690,0
01.AAA.004.054	UJI SAHIIH RUU	Utama	717.902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717.902,0
01.AAA.004.055	FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD	Utama	286.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286.100,0
01.AAA.007	USUL PROLEGNAS DPD RI		1.642.145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.642.145,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AAA.007.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PROLEGNAS USUL DPD	Utama	365.019,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365.019,0
01.AAA.007.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI	Utama	939.076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	939.076,0
01.AAA.007.053	FINALISASI PROLEGNAS USUL DPD	Utama	338.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338.050,0
01.AAA.008	RUU USUL TUGAS PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD RI		9.332.054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.332.054,0
01.AAA.008.051	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAFTING RUU	Utama	484.022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484.022,0
01.AAA.008.052	KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA INVENTARISASI MATERI RUU	Utama	751.238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751.238,0
01.AAA.008.053	STUDI BANDING RUU	Utama	5.066.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.066.548,0
01.AAA.008.054	UJI SAHIF RUU	Utama	678.446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678.446,0
01.AAA.008.055	FINALISASI DRAFT RUU USUL DPD	Utama	311.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311.800,0
01.AAA.008.056	PENETAPAN RUU USUL DARI DPD RI	Utama	2.040.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.040.000,0
01.AAA.009	KONSEP RUU		543.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543.200,0
01.AAA.009.051	HARMONISASI PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU	Utama	543.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543.200,0
02	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR		12.229.171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.229.171,0
02.AAA	Undang-Undang		11.665.552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.665.552,0
02.AAA.002	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU (KOMITE I)		11.385.992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.385.992,0
02.AAA.002.051	PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD	Utama	245.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245.000,0
02.AAA.002.052	PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAERAH OTONOMI BARU	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
02.AAA.002.053	PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN DAERAH OTONOMI BARU	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
02.AAA.002.054	PENYUSUNAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN DPD TENTANG PELAKSANAAN UU TENTANG DESA	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.AAA.005	HASIL PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD RI ATAS RUU TERTENTU		279.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279.560,0
02.AAA.005.051	FINALISASI PENYUSUNAN PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN DPD	Utama	279.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279.560,0
02.AEA	Koordinasi		563.619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563.619,0
02.AEA.002	RUU TERTENTU HASIL PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH)		563.619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563.619,0
02.AEA.002.051	PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA KOMITE I	Utama	233.931,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233.931,0
02.AEA.002.052	PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA KOMITE III	Utama	285.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285.680,0
02.AEA.002.053	PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN PRESIDEN (PEMERINTAH) LINGKUP KERJA PPUU	Utama	44.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44.008,0
04	Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang		3.028.086,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.028.086,0
04.AEA	Koordinasi		3.028.086,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.028.086,0
04.AEA.001	PERSIDANGAN DAN MATERI DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I		1.880.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880.000,0
04.AEA.001.051	PELAKSANAAN FUNGSI DUKUNGAN PENYUSUNAN MATERI DAN PERSIDANGAN DALAM LINGKUP BIRO PERSIDANGAN I	Utama	1.880.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880.000,0
04.AEA.003	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE I		639.816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639.816,0
04.AEA.003.051	KUNJUNGAN KERJA	Utama	639.816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639.816,0
04.AEA.004	RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH LINGKUP TUGAS KOMITE III		508.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508.270,0
04.AEA.004.051	KUNJUNGAN KERJA	Utama	508.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508.270,0
05	Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah		25.029.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.029.754,0
05.AAA	Undang-Undang		25.029.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.029.754,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
05.AAA.003	HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU (KOMITE I)		15.449.052,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.449.052,0
05.AAA.003.051	INVENTARISASI MATERI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU	Utama	5.052.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.052.340,0
05.AAA.003.052	PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	Utama	2.813.934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.813.934,0
05.AAA.003.053	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI DAERAH PERSIAPAN UNTUK MENJADI DAERAH OTONOMI BARU	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
05.AAA.003.054	PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD TENTANG KEBIJAKAN DAU TENTANG DANA DESA	Utama	3.713.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.713.664,0
05.AAA.003.055	PENYUSUNAN BUKU LAPORAN KINERJA KOMITE I	Utama	155.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.450,0
05.AAA.006	HASIL PENYUSUNAN PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU		9.580.702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.580.702,0
05.AAA.006.051	KUNJUNGAN KERJA INVENTARISASI MATERI	Utama	957.669,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957.669,0
05.AAA.006.052	PELAKSANAAN PENGAWASAN UU NO. 8 TAHUN 2019, TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH	Utama	5.637.476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.637.476,0
05.AAA.006.053	PELAKSANAAN PENGAWASAN UU NO.18 TAHUN 2017, TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Utama	1.701.319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.701.319,0
05.AAA.006.054	PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	Utama	493.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493.300,0
05.AAA.006.055	FINALISASI PENYUSUNAN HASIL PENGAWASAN DPD RI ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU	Utama	774.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774.888,0
05.AAA.006.056	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOMITE III	Utama	16.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.050,0
06	Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI		9.910.472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.910.472,0
06.AAH	Peraturan lainnya		409.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409.050,0
06.AAH.001	Peraturan lainnya		409.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409.050,0
06.AAH.001.051	PERENCANAAN	Utama	10.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.950,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
06.AAH.001.052	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN	Utama	398.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398.100,0
06.AEC	Kerja sama		9.501.422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.501.422,0
06.AEC.001	KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN LEMBAGA INTERNASIONAL		9.501.422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.501.422,0
06.AEC.001.051	KERJASAMA BILATERAL PARLEMEN	Utama	4.768.947,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.768.947,0
06.AEC.001.052	SINERGITAS KERJA SAMA BKSP DPD RI DENGAN PERWAKILAN NEGARA SAHABAT DAN STAKE HOLDERS TERKAIT	Utama	567.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567.825,0
06.AEC.001.053	FASILITASI POTENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGUATAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	Utama	385.322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385.322,0
06.AEC.001.054	PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN MATERI DPD PADA KEGIATAN DIPLOMASI INTERNASIONAL BERSIFAT KEDAERAHAN	Utama	3.779.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779.328,0
07	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan		5.579.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.579.410,0
07.ABC	Kebijakan Bidang Politik		5.579.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.579.410,0
07.ABC.001	PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN DAERAH		5.579.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.579.410,0
07.ABC.001.051	PENYUSUNAN PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	Utama	730.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730.793,0
07.ABC.001.052	PEMANTAUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH	Utama	1.622.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.622.315,0
07.ABC.001.053	EVALUASI HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA DAN PERDA	Utama	300.313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.313,0
07.ABC.001.054	PERUMUSAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH	Utama	214.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214.660,0
07.ABC.001.055	UJI PUBLIK	Utama	1.799.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.799.279,0
07.ABC.001.056	PENYUSUNAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN DAERAH	Pendukung	705.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705.750,0
07.ABC.001.057	PENYUSUNAN MATERI KINERJA BULD	Pendukung	206.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
08	Tersedianya masukan atas perubahan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan kebijakan baru		1.227.545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.227.545,0
08.ABC	Kebijakan Bidang Politik		1.227.545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.227.545,0
08.ABC.002	PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN ATAS PERMINTAAN DAERAH TENTANG PERMASALAHAN HUKUM DI DAERAH		1.227.545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.227.545,0
08.ABC.002.051	KONSULTASI STAKEHOLDERS DAERAH	Utama	83.171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83.171,0
08.ABC.002.052	TEMU KONSULTASI LEGISLASI PUSAT-DAERAH	Utama	1.006.324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.006.324,0
08.ABC.002.053	PERUMUSAN	Utama	129.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.050,0
08.ABC.002.054	FINALISASI	Utama	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
09	Tersedianya masukan untuk sinkronisasi legislasi pusat dan daerah		1.317.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.317.408,0
09.ABC	Kebijakan Bidang Politik		692.526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692.526,0
09.ABC.003	MONITORING TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA		692.526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692.526,0
09.ABC.003.051	PEMUTAKHIRAN KONSEPSI	Utama	116.371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116.371,0
09.ABC.003.052	TINJAUAN LAPANGAN	Utama	362.705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362.705,0
09.ABC.003.053	PERUMUSAN MATERI	Utama	195.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195.450,0
09.ABC.003.054	FINALISASI	Utama	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
09.AEA	Koordinasi		624.882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624.882,0
09.AEA.005	DISEMINASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA / PERDA		624.882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624.882,0
09.AEA.005.051	KOMPILASI MATERI	Utama	126.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126.650,0
09.AEA.005.052	DIALOG DAERAH	Utama	355.382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355.382,0
09.AEA.005.053	Diseminasi Rekomendasi DPD RI	Utama	133.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133.850,0
09.AEA.005.054	FINALISASI	Utama	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
11	Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya		1.726.647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.726.647,0
11.AAA	Undang-Undang		1.726.647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.726.647,0
11.AAA.010	UU HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN DPD RI		1.726.647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.726.647,0
11.AAA.010.051	PERENCANAAN	Utama	179.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179.440,0
11.AAA.010.052	PELAKSANAAN	Utama	1.249.132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.249.132,0
11.AAA.010.053	TINDAK LANJUT	Utama	292.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292.000,0
11.AAA.010.054	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PPUU	Utama	6.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,0
Total			93.522.342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93.522.342,0

Jakarta, 20 Mei 2025